

ABSTRAK

Dalam hal ini akan membahas pertimbangan Majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 105/Pid.Sus/2012/PN.Smp mengenai kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I yang dilakukan terdakwa TAUFIK RAHMAN Bin ABD RAHMAN pada hari selasa tanggal 31 Januari 2012 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di dalam rumah terdakwa Dsn.Blower,Desa Nyapar, Kec. Dasuk, Kab. Sumenep.

Dalam Mengadili Kasus tersebut pada Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 105/Pid.Sus/2012/PN.Smp sudah tepat atau tidak dalam pertimbangan majelis hakimnya yaitu menggunakan Undang-undang No.14 Tahun 1970 jo Undang-undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Adapun literatur yang berkaitan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana,Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pendapat para ahli. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pada putusan Nomor 105/Pid.Sus/2012/PN.Smp tidak sah dan batal demi hukum karena dalam pertimbangan Majelis hakim pada putusan tersebut masih hakim menggunakan Undang-undang yang sudah dicabut atau tidak berlaku yaitu masih menggunakan Undang-undang No.14 Tahun 1970 jo Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, seharusnya dalam pertimbangan majelis hakim tersebut pada putusan tersebut, hakim hendaknya memperhatikan asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yaitu tidak menerobos *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori*, asas ini bermaksud bahwa Undang-undang yang lama tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-undang yang baru, jadi dalam pertimbangannya Majelis hakim tersebut hendaknya harus menggunakan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor :105/Pid.SUS/2012/PN.Sumenep.

Kata kunci: Keabsahan Putusan Pengadilan, Narkoba Golongan I.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGASAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MEMORANDUM	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I. POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM	 1
1.1. Posisi Kasus	1
1.2. Pertimbangan Hakim	3
1.3. Putusan Hakim	5
1.4. Isu Hukum.....	7
 BAB II. DASAR HUKUM	 8
2.1. Sejarah Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman	8
2.2. Tinjauan Umum Tentang Hakim	10
2.2.1. Pengertian Hakim	10
2.2.2. Pengertian Kekuasaan Kehakiman	12
2.2.3. Kewajiban Hakim Dalam Persidangan	16
2.2.4. Peran Dan Fungsi Hakim Dalam Persidangan.....	18
2.2.5. Dasar Pertimbangan Hakim	19
2.2.6. Pengertian Putusan Hakim.....	23
2.3. Keabsahan Putusan Dan Perundang-Undangan.....	26
 BAB III. Keabsahan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 105/PID.SUS/2012/PN.SMP Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I	 31
3.1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Sebagai Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori dalam Pertimbangan Majelis Hakim.	31
3.2. Kewenangan dan Kesalahan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor : 105 /Pid.SUS/2012 /PN. Sumenep	37
3.3. Keabsahan Undang-undang No.14 Tahun 1970 jo Undang-undang No. 35 Tahun 1999 dalam pertimbangan Majelis Hakim	45
 BAB IV. PENUTUP	 51
4.1. Kesimpulan.....	51
4.2. Rekomendasi	52

DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	55
BIODATA PENULIS	62

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2013/PN.Smp**